KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD ZAKI YUSUF
14370016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Ketersediaan infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro), dan sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan akibat beberapa faktor, sehingga percepatan dan pembangunan infrastruktur adalah suatu hal yang mutlak bagi suatu negara. Namun, terdapat kendala paling krusial untuk penyediaan infrastruktur, yakni dalam hal pembiayaan. Kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dipandang sebagai solusi dari permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan KPBU yang memiliki berbagai keunggulan dan pengaruh positif, ternyata juga masih memiliki beberapa kendala dan kekurangan sehingga mengakibatkan pengaruh yang negatif kepada masyarakat dan negara Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis, dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikanya, menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisanya secara mendalam dan komprehensif yang bertujuan untuk menjawab pokok masalah tentang bagaimana urgensi dibuatnya kebijakan KPBU serta pengaruh mekanisme KPBU dalam pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dengan menggunakan prinsip maslahat dalam siyasah syar'iyah dan teori *redistributive combines* sebagai pisau analisisnya.

Dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama,* pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek SPAM Umbulan adalah 1) Adanya pembagian peran antara Pemerintah dan Swasta; 2) Adanya pembagian risiko antara Pemerintah dan Swasta; 3) Pembiayaan proyek oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur SPAM Umbulan; dan 4) Perbaikan tingkat pelayanan. *Kedua,* kebijakan pemerintah untuk menggunakan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan dengan tujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara adalah suatu ketepatan serta sesuai dengan prinsip maslahat dalam siyasah syar'iyah, karena kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudharatan. Dan untuk mengoptimalkan regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan, maka masyarakat harus selalu aktif, kritis serta mengontrol agar pelaksanaan dan hasil proyek tersebut tidak menciderai kepentingan umum. Pemerintah juga harus memaksimalkan, teliti serta memiliki political will untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha Pelaksana, agar dapat mengefisiensi regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Penyediaan, Infrastruktur, KPBU

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Zaki Yusuf
NIM	: 14370016
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

81436AEF725736175

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Zaki Yusuf

NIM: 14370016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zaki Yusuf

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Ahmad Zaki Yusuf
NIM	: 14370016
Judul Skripsi	: Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2018 M.
09 Sya'ban 1439 H.

Pembimbing,

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/1174.a/PP.00.9/5/2018

Tugas Akhir dengan Judul :KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZAKI YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 14370016
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 08 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

BELAJAR ITU IBADAH,

BERPRESTASI ITU INDAH

&

JIKA INGIN MENJADI ORANG BESAR,

MAKA LAKUKANLAH HAL BESAR

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa mendukung dan mendo'akan anaknya demi mencapai kesuksesan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat, persembahan terima kasih dari anakmu sungguh tak akan mampu menyamai setitik-pun kasih sayangmu.

Adik-Adikku, Rifqi Rihaldi Yahya dan Yasrinia Salina, kalian harus lebih pintar, lebih hebat, dan lebih sukses dari kakak – dan jadilah manusia kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk almameter tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Khususnya Keluarga Besar Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterrasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	Be
ت	Tā’	t	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	Kadan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م			
ن			
و			
ه			
ء			

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ي	Mim Nūn Waw Hā’ Hamzah Ya	m n w h ‘ Y	Em En W Ha Apostrof Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة عدّة	Ditulis Ditulis	Muta’addidah ‘iddah

C. *Ta’marbūtah*

Semua *Ta’marbūtah* ditulis dengan baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang dikutip oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة جزية كرامةالاولياء	Ditulis Ditulis Ditulis	*Ḥikmah* *Jizyah* *Karāmah al-auliyā’*

D. Vokal Pendek danPenerapannya

_ َ____ _ ِ____ _ ُ____	Fatḥah Kasrah Ḍammah	Ditulis Ditulis Ditulis	*A* *i* *u*

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alifجاهلية	Ditulis	*jāhiliyyah*

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	*tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	*karīm*
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	*furūd*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	Ditulis	*ai*
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2	Dammah + wawumati	Ditulis	*au*
	قول	Ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القران	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياش	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyah* tersebut.

السماء	Ditulis	*As-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	*Zawi al-Furūd*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)" tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., dan Bapak Dr. Moh. Thantowi, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat berharga demi menggapai kesuksesan selama studi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, mengarahkan, serta memberi nasihat-nasihat kepada penyusun dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan *Masterpiece* skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkualiahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Kamarudin dan Ibu Hj. Siti Sa'adah, yang senantiasa mendoakan penyusun dengan tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materiil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua adik tersayang, Rifqi Rihaldi Yahya dan Yasrinia Salina, yang senantiasa mendoakan serta memotivasi penyusun untuk menyelesaikan studi dan skripsi dengan sebaik-baiknya.
10. Keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara, terkhusus sahabat-sahabat Angkatan 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Keluarga besar Korp Dakwah Islamiah Sunan Kalijaga (Kordiska), terkhusus sahabat-sahabat Korp Lebah.
12. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), terkhusus sahabat-sahabat Kawan Nongki dan Korp Laskar Pelangi.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, terkhusus sahabat-sahabat HMI Komfak Syarkum.
14. Keluarga besar IKPM Daya Taka Paser, IKA Rakha Yogyakarta, Joista, Forum Jogja Damai (FJD).
15. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memotivasi penyusun.

Meskipun Skripsi ini telah penyusun coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan senantiasa penyusun tunggu dan terima dengan penuh apresiasi demi kebaikan dan kemanfaatam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan dampak positif bagi seluruh pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2018

Penyusun,

Ahmad Zaki Yusuf
NIM: 14370016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN KEASLIAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KONSEP SIYASAH SYAR'IYAH DAN TEORI *REDISTRIBUTIVE COMBINES*

A. Konsep Siyasah Syar'iyah 16
   1. Kebijakan dalam Siyasah Syar'iyah 16
   2. Prinsip Maslahat dalam Siyasah Syar'iyah 19
B. Teori *Redistributive Combines* 24
   1. Konsep *Redistributive Combines* 24
   2. Hubungan Teori *Redistributive Combines* dengan Teori Keadilan 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

A. Kebijakan dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur 30
   1. Kondisi dan Pengaruh Infrastruktur 30
   2. Masalah dalam Penyediaan Infrastruktur 33
   3. Kebijakan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 35
B. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Infrastruktur Air Minum 39
   1. Profil Mata Air Umbulan 39
   2. Proyek KPBU dalam SPAM Umbulan 42

BAB IV ANALISIS KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PROYEK SPAM UMBULAN

A. Pemilihan KPBU sebagai Mekanisme Pelaksanaan Proyek 52
B. Efisiensi Regulasi Ekonomi Proyek 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi para arsitek ekonomi negara dan pelaku pasar global, *core value* daya saing masing-masing negara saat ini diukur dari kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, infrastruktur sains, maupun infrastruktur teknologi suatu negara. Miskin dan rapuhnya infrastruktur suatu negara berdampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat[1]. Hal itu karena Infrastruktur adalah roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, dan secara empiris, pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Infrastruktur yang layak dan memadai juga mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Peningkatan pada infrastruktur energi, transportasi dan telekomunikasi dapat secara langsung mengurangi biaya produksi dan waktu yang diperlukan dalam melakukan aktifitas perekonomian, sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kapasitas produksi para pelaku ekonomi suatu negara.

[1] Marwan Ja'far, *Infrastruktur Pro Rakyat: Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), cet. ke-1, hlm. 201.

Ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sudah menjadi teori yang tak terbantahkan, karena ketersediaan infrastruktur yang baik mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan hubungan inter-regional dan memfasilitasi alokasi sumber daya, sehingga diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga dapat menghasilkan mobilitas tenaga kerja antar daerah untuk menjadi lebih baik yang akan mendorong terbentuknya investasi baru, lapangan kerja baru dan mampu menciptakan peningkatan pada pendapatan masyarakat.[2]

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional tersebut, pemerintah telah mengupayakan percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur penunjang pembangunan, seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, energi dan listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi, serta komunikasi dan informatika.[3]

Hingga kini kebutuhan pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi untuk penyediaan infrastruktur tidak bisa bergantung hanya pada investasi Pemerintah saja. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia membutuhkan sumber pendanaan baru untuk menutupi *financial gap* dalam pembangunan infrastruktur. Satu terobosan yang perlu dilakukan adalah

---

[2] Erika Sefila Putri dan Wisudanto, *Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi*, dalam Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Grha ITS Surabaya, 03 Agustus 2016.

[3] https://www.bappenas.go.id/files/6213/5216/0347/05buku-ii-rkp-2012---babv__20110524155612__3161__10.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2017.

melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema KPBU[4] atau *Publik Private Partnership* (PPP), yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur. Dengan skema ini *private investor* dapat menyediakan dana untuk pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur serta menjamin proyek dapat berjalan secara efisien. Sehingga proyek dapat dikelola dengan baik untuk menghasilkan *expected return* yang sesuai.

Peningkatan peran pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur ini juga sejalan dengan arahan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019[5].

Selain itu, pemberian fasilitas kebijakan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

[5] Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

[6] Kementerian PPN/ Bappenas, *"RKP 2018 Gunakan Prinsip Money Follows Program"*, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/musyawarah-perencanaan-pembangunan-nasional-2017-untuk-rencana-kerja-pemerintah-rkp-20181/, diakses pada tanggal 29 November 2017.

Namun dalam pengalaman penyelenggaraan tender KPBU selama ini, ada beberapa permasalahan utama yang bisa di temukan, yaitu persiapan proyek yang tidak optimal, kompleksitas politik lokal, regulasi, hukum, aspek pendanaan yang belum sinkron, pembebasan lahan, lemahnya manajemen KPBU,[7] serta proyek yang tidak dirancang, didokumentasikan, dan disusun sesuai dengan praktik terbaik internasional.[8]

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka investasi dan pelayanan umum. Untuk menarik modal dan keahlian swasta dalam penyediaan infrastruktur yang pada umumnya bersifat kompleks dan berisiko tinggi, Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor dan lembaga pembiayaan[9]

Dari pemaparan data dan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU dengan menggunakan contoh proyek KPBU di Indonesia, yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Selanjutnya, penelitian ini akan penyusun sajikan dalam skripsi dengan judul :"Kebijakan Penyediaan

---

[7] Bernardus Djonoputro, "Kesiapan Proyek Tentukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur",http://properti.kompas.com/read/2016/07/10/112017021/kesiapan.proyek.tentukan.percepatan.pembangunan.infrastruktur, diakses pada tanggal 26 Januari 2018.

[8] Julian Smith dkk., *Membangun Masa Depan Indonesia Membuka Aliran Proyek*, Jurnal Prakarsa edisi 22, Oktober 2015, hlm. 12.

[9] Kementerian PPN/ Bappenas, https://www.bappenas.go.id/files/3313/6082/9889/bab-33__20090202204616__1756__34.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2017.

Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka di rumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan?
2. Bagaimana analisis prinsip maslahat dan teori *redistributive combines* terhadap penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini , yaitu :

1. Menjelaskan kondisi serta pengaruh infrastruktur terhadap negara dan masyarakat Indonesia.
2. Menjelaskan latar belakang munculnya kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia.
3. Menjelaskan tentang profil Mata Air Umbulan (MAU) dan KPBU dalam proyek SPAM Umbulan.
4. Menjelaskan pengaruh penggunaan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan.
5. Menjelaskan cara mengefisiensi regulasi ekonomi proyek SPAM Umbulan.
6. Menjelaskan analisis prinsip maslahat dalam Siyasah Syar'iyah dan Teori *Redistributive Combines* mengenai KPBU dalam proyek SPAM Umbulan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam wawasan keilmuan, terutama dalam bidang hukum tata negara. Dan dapat memberikan suatu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada praktisi hukum, pemerintah, maupun akademisi. Dan dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membuat dan menyusun kebijakan, sehingga dapat mengoptimalkan kebijakan penyediaan infrastruktur di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna untuk menghindari kesamaan penelitian.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dicari dan dikaji, ada beberapa literatur yang sedikit banyak berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penyusun, tetapi belum ada yang membahas mengenai kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) studi kasus proyek SPAM Umbulan, dengan menggunakan perspektif prinsip maslahat dalam siyasah syar'iyah dan teori *redistributive combines*.

Pertama, artikel David Ray yang berjudul "Proposal Inovatif untuk Mempromosikan Infrastruktur yang Didanai Swasta" dalam Jurnal Prakarsa edisi 22, Oktober 2015. Dalam jurnal ini dijelaskan mengapa di Indonesia belum terlihat pertumbuhan yang pesat dalam hal penyediaan infrastruktur oleh swasta. Secara ringkas, masalah utamanya adalah Indonesia belum mengembangkan model risiko yang tepat untuk menarik investasi. Oleh karenanya, perlu diusulkan untuk dibentuk sebuah lembaga baru, *Infrastructure Partnerships* Indonesia (Kemitraan Infrastruktur Indonesia), guna mengedepankan proyek-proyek infrastruktur Indonesia dan memastikan kemajuannya. Karena jika pengaturan risiko sudah benar, mungkin jutaan atau bahkan miliaran dolar dana swasta telah diinvestasikan.

Temuan penting dari studi ini adalah bahwa sebuah lembaga dengan beragam pemangku kepentingan yang baru memang bisa memainkan peran yang berharga – namun harus memiliki fokus yang sangat berbeda dari yang diuraikan dalam catatan konsep awal: yaitu, lembaga ini harus didasarkan pada tindakan, keterlibatan langsung dan advokasi.[10]

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Dini Suci Fatimah (2011), mahasiswa S2 Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada yang berjudul "Pinjaman Daerah Dan *Publik Private Partnership* sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Labuhanbatu." Penulisan ini

[10] David Ray, *"Proposal Inovatif untuk MempromosikanInfrastruktur yang Didanai Swasta"* Jurnal Prakarsa edisi 22, Oktober 2015.

menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah dan menghitung batas maksimum pijaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan badar udara perintis Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis penerapan PPP sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan bandar udara perintis Kabupaten Labuhanbatu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu *(time series*) berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu dari 2005-2009 yang terdiri dari PAD, BHP/BHBP, DAU dan belanja wajib yang terdiri dari gaji pegawai dan gaji DPRD, data PDRB Kabupaten Labuhanbatu, serta data studi kelayakan bandar udara Kabupaten Labuhanbatu.[11]

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Irvan Amirullah (2009), mahasiswa S2 MagisterPerencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada yang berjudul"Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Melalui Kerjasama Pemerintahdan Swasta Pada Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta". Penulisan ini membahas mengenai pentingnya pemerintah daerah untuk menyediakan sarana infrastruktur perkotaan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini meneliti proyek kerjasama pemerintah dan swasta pada TerminalGiawangan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penulisan hukum ini, diambil kesimpulan bahwa perjanjian KPS Giwangan tidak berhasil

[11] Dini Suci Fatimah, "Pinjaman Daerah Dan Publik Private Partnership sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Labuhanbatu", *Tesis* Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada, 2011.

mencapai *value-for-money* karena resiko dialokasikan secara kurang mantap dan beberapa jenis resiko disadari saat proyek berjalan.[12]

Keempat, artikel Maman Suhendra yang berjudul "Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public-Private Partnership*) di Indonesia" dalam Jurnal Manajemen Keuangan Publik. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur dan kebijakan/regulasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pertama, penulis mempelajari data-data relevan terkait dengan kondisi pendanaan dan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Berdasar data-data ini, kemudian penulis melakukan identifikasi bagaimana pelaksanaan skema KPBU secara umum di Indonesia serta perbedaan model pengadaan KPBU tersebut dengan model pengadaan tradisional. Terakhir, berdasarkan studi regulasi terkait, penulis melakukan pemetaan atas fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan Pemerintah dalam mendukung skema KPBU. Namun penelitian ini masih bersifat umum untuk mengenal skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur.[13]

Kelima, Skripsi yang ditulis M. Febri Zulkarnain (2017), mahasiswa S1 Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin yang berjudul "Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan

---

[12] Irvan Amirullah, “Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta", *Tesis* Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada, 2009.

[13] Maman Suhendra, *"Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Publick-Private Partnership) di Indonesia"*, Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Juli 2017.

kemitraandalam pengelolaan sampah di bidang kebersihan lingkungan dengan melihat darimekanisme dari kemitraan tersebut yang memiliki indikator yaitu di bidang kontrakdan kesepakatan, bantuan dana, struktur, dan insentif menurut konsep *hollow state.* Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa di TPA Tamangapa telah dilakukan kerjasama proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) pembakaran *Landfill Gas*,yang terlibat dalam proyek ini yaitu Pemerintah Kota Makassar yang mengontrol danmengawasi proyek CDM, PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang mengambil alih pendanaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek pembakaran LFG.[14]

E. Kerangka Teoritik

Dilihat dari data dan permasalahan mengenai kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU, maka penyusun menggunakan prinsip maslahat dalam teori siyasah syar'iyah serta teori *redistributive combines* sebagai pisau analisis yang tepat untuk menganalisa data-data dan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan penggunaaan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at Islam.[15] Abdurrahman Taj mempertegas rumusan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan

[14] M. Febri Zulkarnain, "Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017.

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5.

umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan akan hal tersebut tidak ditegaskan secara riil baik oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah.[16]

Kemudian dalam kaidah-kadiah siyasah syar'iyah ada sebuah kaidah yang berbunyi:

تصرف اللإ ما م على ا لرعية منوط با لمصلحة[17]

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat banyak dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah dari rakyat (ummat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.[18]

Maka dalam penggunaan teori atas kaidah ini juga akan dibahas terkait konsep maslahat *mursalah* yang terkandung didalamnya[19]. Bahwa sebuah kebijakan pemimpin suatu negara harus membawa kemaslahatan bagi objek kebijakannya bahkan masyarakat secara luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] *Ibid*, hlm. 18

[18] Imam Musbikin, *Qawaid al Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.

[19] Istilah *Maslahat Mursalah* dapat diartikan dalam dua pengertian, *pertama*, dalam kemaslahatan semata-mata. *Kedua*, metode penemuan hukum dengan berdasar pada kemaslahatan semata-mata. Dalam hal ini penyusun memakai pengertian *Maslahat Mursalah* yang pertama, yakni penilaian tentang pembuatan, mekanisme, serta dampak kebijakan yang seharusnya semata-mata untuk kemaslahatan. Lihat Oman Fathurohman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lesfi, 1994), hlm. 115-116.

Didalam penjelasan kaidah ini juga, pada pasarnya seorang penguasa atau pemimpin merupakan wakil dari rakyat untuk menyelenggarakan beberapa kebijakan, diantaranya adalah : 1) Menegakan keadilan; 2) Menghindari kedzaliman; 3) Menjaga hak dan akhlak masyarakat; 4) Memelihara keamanan; 5) Menyebarkan ilmu pengetahuan; dan 6) Meningkatkan fasilitas umum.

Dilihat dari segi kebijakannya, agar dapat menganalisis secara tepat dan tajam, maka penyusun juga menggunakan teori *redistributive combines*. Menurut Rachbini, dalam pola *redistributive combines* ini sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan terbatas – puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat *previlege* khusus. Dalam kerangka pemikiran Hernando de Soto, berlakunya pola *redistributive combines* ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena dilindungi sistem hukum yang baru dan ketiadaan *rule of law* di bidang ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan pola *redistributive combines* tersebut. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan prosedur penetapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa[20].

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

---

[20] Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). cet. ke-3, hlm. 66.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam objoek kajian penelitian ini.[21]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analisis*. Deskriptif-analisis adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikanya, menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisanya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.[22]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat dan memahami kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan dengan menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas atau kaidah-kaidah maslahat yang ada dalam siyasah syar'iyah dan juga menggunakan teori *redistributive combines*.

---

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

[22] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-1, hlm. 338.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan mendalami data yang didapat dari perundang-undangan, situs instansi pemerintahan, instansi-instansi lain yang terkait, buku-buku, artikel-artikel (baik yang ada di internet maupun surat kabar), jurnal, maupun karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induksi dan deduksi. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan, untuk menemukan kesimpulan umum. Dan deduksi merupakan analisis berdasarkan prinsip maslahat dan teori *redistributive combines* untuk menilai kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan atau tidak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Maka penyusun membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuah bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan landasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yakni prinsip maslahat dalam siyasah syar'iyah dan teori *redistributive combines.*

Bab ketiga, berisi tentang penguraian data-data tentang kondisi dan pengaruh infrastruktur di Indonesia, latar belakang munculnya kebijakan KPBU, tinjauan umum KPBU, Profil Mata Air Umbulan serta KPBU dalam proyek SPAM Umbulan.

Bab keempat, membahas tentang analisis prinsip maslahat dalam siyasah syar'iyah dan teori *redistributive combines* terhadap kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang telah di analisis menggunakan prinsip maslahat dalam siyasah syar'iyah dan teori *redistributive combines*, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek SPAM Umbulan adalah 1) Adanya pembagian peran antara Pemerintah dan Swasta, jadi Pemerintah tidak sangat berat berperan dalam pelaksanaan proyek; 2) Adanya pembagian risiko antara Pemerintah dan Swasta, jadi Pemerintah tidak terlalu banyak menanggung risiko sehingga dapat mengoptimalkan dan mentransfer risiko dengan tepat; 3) Pembiayaan proyek oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur SPAM Umbulan akan mengurangi beban pemerintah dalam jangka pendek, sehingga dana pemerintah dapat digunakan untuk membiayai kepentingan lainnya; 4) Perbaikan tingkat pelayanan, karena Badan Usaha menyediakan tenaga ahli, manajemen, dan teknologi yang akan memperbaiki kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kompetisi untuk meningkatkan kualitas dalam arti pengembangan dan inovasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dari analisis prinsip maslahat dan teori *redistributive combines* terhadap penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan terdapat dua hasil. *Pertama,* kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan mekanisme konvensional, tetapi lebih memilih untuk menggunakan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan dengan tujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara adalah suatu ketepatan serta sesuai dengan prinsip maslahat dalam siyasah syar'iyah, karena kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudharatan. *Kedua,* untuk mengoptimalkan regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan, maka masyarakat harus selalu aktif, kritis serta mengontrol agar pelaksanaan dan hasil proyek tersebut tidak menciderai kepentingan umum. Pemerintah juga harus memaksimalkan, teliti serta memiliki political will untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha Pelaksana, agar dapat mengefisiensi regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan tersebut.

B. Saran

Penyusun mempunyai saran guna merespon temuan data analisis terhadap masalah yang ada, diantaranya:

1. Pemerintah harus terus menyempurnakan kerangka penyelenggaraan KPBU, agar dapat berjalan dengan baik dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia.
2. Apabila terdapat kekurangan dan kendala dari substansi peraturan, regulasi dan prosedur kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) harus segera di atasi dan harus segera diaplikasikan pula strategi serta solusi untuk mengoptimalkan peran kebijakan KPBU kepada masyarakat dan negara Indonesia.
3. Pemerintah harus mempunyai *political will* untuk menjaga dan memberikan sebanyak-banyaknya manfaat suatu proyek infrastruktur kepada kepentingan umum. Agar proyek infrastruktur yang strategis secara ekonomi dapat menghasilkan keuntungan baru bagi negara dan rakyat, serta untuk mencegah praktek kapitalisasi proyek oleh swasta yang mengoperasikannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Fikih

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi dan Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyeleseikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia, 2006.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Lain-Lain

BPPSPAM, *Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*, Jakarta: Kementerian PUPR, 2017.

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, *Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR*, Jakarta: Kementerian PUPR, 2017.

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, *Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*, Jakarta: DJPPR.

Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003.

Heywood, Andrew, *Politik*, alih bahasa Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ja'far, Marwan, *Infrastruktur Pro Rakyat: Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21*, Yogyakarta: LkiS, 2007.

Kementerian ESDM, *Draft Laporan Tim Koordinasi Penyusunan Bahan RPJMN Rencata Strategis 2015-2019*, 2014.

Kementerian Keuangan RI, *Fasilitas Pemerintah untuk Mendukung Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)*, Jakarta: Dirjen PPR dan Direktorat PDPPI, 2017.

Kementerian PPN/ Bappenas, *Buku I (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Agenda Pembangunan Nasional: Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*, Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas, 2014.

Kementerian PPN/Bappenas, *Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2013: Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat tahun 2012*, Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas, 2012.

MD., Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia*, Jakarta: PT PII, 2016.

PT. Sarana Multi Infrastruktur, *Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam Penyediaan Infrastruktur*, Jakarta: PT SMI, 2014.

Ratna, Kutha Nyoman, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Saleh, Darwin Zahedy, *Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia, Jakarta: Ruas, 2014.*

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam* Alih Bahasa Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Tim Simpul KPBU-SPAM Umbulan, *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum*, Pemprov Jatim, 2017.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Kategori Skripsi dan Jurnal

Abdul Maqin, *Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat*, Jurnal Trikonomika, Volume 10, No. 1, Juni, 2011.

Ariesy Tri Mauleny, *Dilema Skema Pembiayaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia*, Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. IX, No. 22/II/Puslit, November, 2017.

Bambang Susantono & Mohammed Ali Berawi, *Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia,* Jurnal Transportasi Vol. 12, No. 2, Agustus, 2012.

David Ray, *Proposal Inovatif untuk Mempromosikan Infrastruktur yang Didanai Swasta,*Jurnal Prakarsa edisi 22, Oktober, 2015.

Dini Suci Fatimah, *"Pinjaman Daerah Dan Publik Private Partnership sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Labuhanbatu",* Tesis Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada, 2011.

Elizabeth Goodbody, *Mengelola Tantangan Korupsi dalamTata Kelola Infrastruktur*, Jurnal Prakarsa, edisi 13, Januari, 2013.

Irvan Amirullah, *"Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta",* Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada, 2009.

Joel Friedman dan Andrew McLernon, *Pemerintah Daerah dan Manajemen Aset Infrastruktur*, Jurnal Prakarsa, edisi 24, April, 2016.

Julian Smith dkk., *Membangun Masa Depan Indonesia Membuka Aliran Proyek*, Jurnal Prakarsa, edisi 22, Oktober, 2015.

Luh Putu Putri Awandari dan I Gst Bgs Indrajaya, *Pengaruh Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 5 No. 12, Desember, 2016.

M. Febri Zulkarnain, *"Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar",* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017.

Majalah Potensi Jawa Timur, Edisi 67, Juli, 2016.

Maman Suhendra, *Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Publik-Private Partnership) di Indonesia*, Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 1, No.1, 2017.

Mohammad Noer dan Mochdar Soleman, *Nawa Cita sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014*, Jurnal Politik, Vol. 13 No. 17, 2017.

Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus, *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Mei, 2009.

Sukriyah Kustanti Moerad dan Endang Susilowati, *Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Ramah Lingkungan (Studi Kasus Air Bersih di Umbulan Pasuruan)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 1, Juni, 2016.

Tunjung Hapsari, *Pengaruh Infrastrultur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Kategori Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Artikel Internet

Agus Supriadi, “Gagalnya Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Swasta”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141007161843-78-5638/gagalnya-proyek-infrastruktur-kerjasama-pemerintah-swasta, diakses pada tanggal 06 April 2018.

Bernardus Djonoputro, “Kesiapan Proyek Tentukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur”,http://properti.kompas.com/read/2016/07/10/112017021/kesiapan.proyek.tentukan.percepatan.pembangunan.infrastruktur diakses pada tanggal 26 Januari 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2017/08/22/85845/0/25/Pembangunan-Infrastruktur-Era-Jokowi-Bukan-Untuk-Rakyat-Tapi-Untungkan-Swasta diakses pada tanggal 29 November 2017.

https://www.bappenas.go.id

Ihsanuddin, "Sosiolog UI Sebut Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Bukan untuk.Rakyat",http://nasional.kompas.com/read/2016/12/21/15132441/sosiolog.ui.sebut.pembangunan.infrastruktur.era.jokowi.bukan.untuk.rakyat diakses pada tanggal 29 November 2017.

Ilyas Istianur Praditya, "Sri Mulyani: Banyak Pejabat Belum Paham Skema Kerja Sama Proyek dengan Swasta", https://www.liputan6.com/bisnis/read/3326580/sri-mulyani-banyak-pejabat-belum-paham-skema-kerja-sama-proyek-dengan-swasta, diakses pada tanggal 06 April 2018.

Nyimas Latifah Letty Aziz, "Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia", http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia, diakses 26 Januari 2018.

Yanita Petriella, "Sejarah Panjang Pembangunan SPAM Umbulan", http://industri.bisnis.com/read/20170722/45/673864/sejarah-panjang-pembangunan-spam-umbulan, diakses pada tanggal 19 April 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA